

**RINGKASAN HASIL PENELITIAN MELIBATKAN
MAHASISWA**



**KOMPARASI KEBIJAKAN DALAM NEGERI KABINET
SOEKIMAN DENGAN KABINET DJUANDA**

Diusulkan Oleh:

Zulkarnain, M. Pd NIP: 197408092008121001
Rhoma Dwi Aria Yuliantri, M. Pd NIP: 198207042010122004
Email: ariayuliantri@uny.ac.id
Mahasiswa yang Terlibat:

Asep Restu Nugraha NIM: 09406244021
Wasis Wijayanto NIM: 09406244015

**PRODI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan dalam kebijakan politik dalam negeri masa kabinet Soekiman dengan kabinet Djuanda. Perbandingan kedua kabinet ini sangat penting karena keduanya memiliki kekhasan tersendiri sebagai kabinet pada masa Soekarno. Kabinet Soekiman mewakili kabinet dengan sistem parlementer sedangkan kabinet Djuanda mewakili masa demokrasi terpimpin.

Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis, dengan beberapa tahapan (1) Pemilihan objek, (2) Heuristik (menentukan sumber sejarahnya), (3) Kritik (mempelajari sumber sejarah), (4) Interpretasi, (5) Penulisan. Heuristik dilakukan dengan mengumpulkan sumber primer maupun sekunder. Sumber primer yaitu berupa dokumen tertulis, surat kabar, maupun foto. Sedangkan sumber sekunder dilengkapi dari sumber-sumber lain yang sezaman maupun yang kontemporer.

Target yang diharapkan dalam membandingkan kedua kabinet ini adalah mengetahui perbedaan baik kelebihan maupun kelemahan dari masing-masing kabinet. Setelah mengetahui kelemahan dan kelebihan kedua kabinet ini, maka diharapkan dapat memberikan benang merah untuk mencari model kepemimpinan dan kebijakan pemerintahan yang tepat bagi Indonesia saat ini.

Kata Kunci: Soekiman, Djuanda, Kabinet, Kebijakan Pemerintah, Politik

A. Latar Belakang Masalah (Analisis Situasi)

Perjuangan menuju negara “Indonesia” yang merdeka diejawantahkan dalam banyak bentuk dan varian. Sebelum abad ke-20 perjuangan dominan dilakukan dalam bentuk peperangan. Namun pada dasarwasa abad 20, pola perjuangan memasuki titik perubahan yang cukup signifikan dengan banyak varian, dari perjuangan lewat jalan perlawanan politik, pers, dan pendidikan hingga akhirnya memunculkan kesadaran baru. Kesadaran baru ini dipicu dengan perjuangan melalui revolusi fisik yang dilakukan hampir seluruh elemen dibarengi dengan perjuangan lewat jalur diplomasi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuang tersebut menemukan titik terang dengan diproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Pemerintah Indonesia, di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta sebagai roda penggerak negara yang baru berdiri berusaha semaksimal mungkin menstabilkan kondisi perpolitikan. Salah satu cara yang ditempuh untuk menstabilkan kondisi pemerintahan pada saat itu adalah dengan membentuk kabinet yang diketuai oleh pedana menteri.

Kabinet yang pertama yang berhasil dibentuk adalah kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951). Natsir yang berasal dari partai Masyumi harus meletakkan jabatannya karena desakan dari partai oposisi yang kecewa pada kebijakannya mengenai pembebasan Irian Barat.¹

Sebagai pengganti kabinet Natsir dibentuklah kabinet Soekiman (1951-1952) dari partai Masyumi. Meskipun dari partai Masyumi, Soekiman dipilih karena dinilai oleh Soekarno sangat piawai dalam menjalin hubungan antar partai yang saling bersaing satu sama lain. Ironisnya Soekiman sebagai pedana menteri tidak mendapat dukungan dari partainya Masyumi.

Setelah kabinet Soekiman meletakkan jabatan maka beralilah ke kabinet Wilopo, kabinet Ali I, kabinet Burhanudin Harahap, dan kabinet Ali II. Pada masa kabinet Natsir hingga kabinet Ali II kondisi perpolitikan dan ekonomi Indonesia kurang lebih sama yaitu mengalami kekacauan dan ketidakstabilan.

Kondisi politik yang kurang stabil dan terjadinya krisis pada tahun 1957 menjadikan latar belakang Soekarno membentuk pemerintahan yang dinamai dengan “Demokrasi Terpimpin”. Konsep yang dinilai Soekarno lebih cocok dengan Indonesia didukung oleh beberapa partai, seperti PNI (Partai Nasional Indonesia), PKI (Partai Komunis Indonesia), Murba, dan beberapa partai lainnya. Dilain pihak PSI (Partai Sosialis Indonesia), Masyumi, NU (Nadatul Ulama), dan Partai Katolik menolak gagasan Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin.²

¹ Lih. Suswanta, *Keberanian untuk Takut; Tiga Tokoh Masyumi dalam Drama PRRRI*. Yogyakarta: Avyrouz, 2000, hlm. 37.

² Mc. Riklef, *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998, hlm. 385.

Tidak lama setelah konsepsi Demokrasi Terpimpin, kabinet Ali II mengundurkan diri pada tanggal 14 Maret 1957. Atas kemunduran kabinet Ali II, maka Soekarno membentuk tim formatur yang ia ketuai sendiri, setelah Soerwirjo (formatur) mengalami kegagalan untuk mencari pengganti kabinet Ali II. Selain itu, Soekarno juga akan menunjuk orang-orang yang akan duduk dalam menteri kabinet.³

Formatur yang dipimpin oleh Soekarno membentuk Kabinet Darurat Ekstra Parlemen dengan Ir. Djuanda sebagai perdana menteri. Kabinet Djuanda diberi nama Kabinet Karya.⁴ Kabinet Karya resmi dilantik 9 April 1957, dalam situasi politik yang memprihatikan, seperti terjadinya pergolakan diperbagai daerah.

Penelitian ini akan membandingkan kebijakan politik dalam negeri masa kabinet Soekiman dengan kabinet Djuanda. Perbandingan kedua kabinet ini sangat penting karena kedua kabinet ini memiliki kekhasan tersendiri baik dari kebijakan maupun situasi perpolitikan. Kabinet Soekiman dapat mewakili kabinet ketika sistem parlementer di Indonesia, sedangkan kabinet Djuanda mewakili kabinet yang ada pada masa demokrasi terpimpin. Selain itu, kabinet Soekiman adalah gambaran kabinet yang berasal dari partai sedangkan kabinet Djuanda dibentuk dari non-partai, sehingga dinamika perpolitikan keduanya akan berbeda. Perbedaan keduanya baik kelebihan maupun kelemahan dari masing-masing kabinet diharapkan dapat memberikan benang merah untuk mencari model kepemimpinan dan kebijakan pemerintahan yang tepat bagi Indonesia saat ini.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kebijakan politik dalam negeri pada masa kabinet Soekiman?
- b. Bagaimana kebijakan politik dalam negeri pada masa kabinet Djuanda?
- c. Bagaimana Perbandingan Politik dalam Negeri Kabinet Soekiman dengan Kabinet Djuanda serta benang merah dalam Konteks Kepemimpinan Indonesia saat ini?

C. Tujuan Penelitian

- a. Mengidentifikasi kebijakan politik dalam negeri pada masa kabinet Soekiman.
- b. Mengidentifikasi kebijakan politik dalam negeri pada masa kabinet Djuanda.
- c. Membandingkan kedua kebijakan kedua kabinet dan mencari benang merah kebijakan politik dalam negeri Soekiman dan Djuanda pada konteks politik dan kepemimpinan Indonesia pada saat ini.

³ George Mc. T. Kahin, ed., *Major Government of Asia*, Ithaca: Cornell University Press, edition 1976, hlm. 64, dalam Yahya Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982, hlm.

⁴ Sekretaris Negara, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*, Jakarta Cicero Indonesia, 1981, hlm. 110.

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini akan menggunakan literatur pustaka yang mendukung tema penulisan sebagai landasan penelitian. Selain sebagai landasan penelitian kajian pustaka akan digunakan sebagai sumber informasi mengenai permasalahan yang akan dikaji.

Buku tulisan Efriza Syafuan Rozi, *Parlemen Indonesia: Geliat Volksraad hingga DPD*, Bandung: Alfabeta, 2010 akan mendukung informasi mengenai kondisi politik dan parlemen Indonesia. Informasi dalam buku ini dapat memberikan gambaran umum tentang kondisi perpolitikan di Indonesia.

Selain itu untuk menganalisis tentang kondisi partai politik saat kabinet Soekiman maupun kabinet Djuanda akan digunakan buku karya Delier Noer, *Partai Islam di Pantas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, Mizan, 1999. Buku ini memberikan informasi tentang bagaimana sikap partai-partai Islam pada masa kabinet Soekiman. Sikap partai-partai Islam pada masa kabinet Soekiman tentu sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh Soekiman. Apalagi Soekiman berasal dari partai Islam, Masyumi.

“Kedjatuhan Kabinet”, *Suara Partai Masjumi*, No. 3-4, Maret/April 1951, artikel ini memuat tentang kejatuhan kabinet Natsir dan sikap partai untuk mengganti kabinet ini. Artikel ini juga membahas bagaimana dukungan Masyumi terhadap Natsir dan kurang mendukung terhadap Soekiman.

Buku yang mengkaji kebijakan politik dalam negeri kabinet Djuanda adalah buku berjudul *Ir. H. Djuanda Kartawijaya*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Nasional, 1983. Buku ini berisi tentang kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa kabinet Djuanda, misalnya dengan program “Panca Karya”. Program “Panca Karya”, yaitu 1) membentuk Dewan Nasional, 2) Normalisasi keadaan republik, 3) melaksanakan pembatalan KMB, 4) Perjuangan Irian Barat, 5) Mempertahankan Pembangunan. Tujuan program “Panca Karya” adalah untuk menstabilkan keadaan negara.

E. Metode/Prosedur Penelitian

Penelitian sebagai kerja ilmiah membutuhkan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan ditelitinya. Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian historis. Metode penelitian historis adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Lebih lanjut, Louis Gottschalk⁵ menguraikan intisari dari metode penelitian sejarah dalam empat langkah kegiatan yaitu:

1. Pengumpulan objek yang berasal dari zaman itu dan pengumpulan bahan-bahan tercetak, tertulis, dan lisan yang boleh jadi relevan (*heuristic*).
2. Menyingkirkan bahan-bahan (atau bagian-bagian daripadanya) yang tidak autentik (kritik).
3. Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bahan-bahan yang autentik (interpretasi).

⁵ Gootschalk, Louis. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press. Hlm. 32.

4. Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya menjadi sesuatu kisah atau penyajian (historiografi).

F. Hasil Penelitian

a. Politik dalam Negeri Soekiman

Perjalan Soekiman dari awal memang tidak mudah. Partainya sendiri yaitu Masyumi tidak memberikan dukungan penuh kepada Soekiman. Hal ini dipicu dari sikap Soekiman yang tidak terlalu mengindahkan keputusan musyawarah Dewan Partai Masyumi, agar batas lima hari untuk membentuk kabinet dipegang teguh dan mengembalikan mandat bila tugas tidak selesai.⁶ Setelah lima hari berselang, Soekiman terus maju, bahkan ia tidak menghadiri rapat pimpinan partai untuk menentukan sikap terhadap kabinet. Perbedaan pandangan dalam tubuh Masyumi pun mulai menyeruak antara pendukung Natsir dan Soekiman.⁷

Dilain pihak, partai-partai kecil membentuk koalisi bersama dan mengangap formatur Soekiman-Sidik tidak memenuhi program minimum persetujuan bersama Badan Permusyawaratan. Badan Permusyawaratan terdiri dari Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Rakjat Nasional, Partai Buruh, PKI, Parindra, PERMAI, Partai Rakjat Indonesia, Partai Islam Perti, Partai Murba, Partai Indo Nasional, dan Partai Tani Indonesia.⁸ Persetujuan bersama menetapkan mukadimah, peraturan dasar dan Program bersama yang mencakup 10 pandangan. Badan permusyawaratan juga mengikat partai-partai didalamnya untuk menolak duduk dalam kabinet Soekiman-Sidik.

Penolakan partai-partai inilah barangkali menjadi latar belakang Soekiman mengambil kebijakan dalam negeri yang cukup berani dan kontrovesi yang dikenal dengan “Razia Agustus”. membuat yang membuat Soekiman bersikap keras dengan mengeluarkan surat perintah untuk mengadakan Razia Agustus 1951, setelah ia menjabat sebagai pedana menteri.

“Razia Agustus” adalah peristiwa penangkapan yang dilakukan tidak hanya pada satu aliran politik, tetapi ditujukan kepada pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang dianggap berencana melakukan “coup d’etat” di Jakarta berhubungan dengan peristiwa Tanjung Priok. Anggota-anggota dan pemimpin yang dianggap akan melakukan kudeta seperti, pimpinan PKI, PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), Partai Murba, Partai Rakjat Indonesia, Partai Permai, Partai Demokrasi Rakjat, PNI (Partai Nasional Indonesia), PSI (Partai Sosialis Indonesia), SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), dan sarekat-sarekat buruh, Pemuda Rakjat, Gerwis, Komite Pembela Perdamaian Dunia, BTI (Barisan Tani Indonesia), RTI, Sakti, orang-orang Tionghoa dan lainnya. “Razia Agustus” diperkuat dengan Surat perintah Jaksa Agung tertanggal 15 Agustus 1951 didasarkan atas perintah rahasia pemerintah tertanggal 13 Agustus 1951.⁹ Mengapa pemerintah bersikap demikian?

⁶ Delier Noer, 2000. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Bandung: Mizan, h. 229.

⁷ Natsir lebih mendalami Islam daripada Soekiman. Tapi Soekiman lebih bisa diterima oleh NU. Lihat *Ibid.*, h. 476.s

⁸ “Pernyataan Badan Permusyawaratan Tentang Kabinet, *Bintang Merah*, No. 6-7, 15 Maret-1 April 1951, h. 170-171.

⁹ “Razia Agustus; Suatu bagian dari rentjana pengluasau [sic] perang Amerika”, *Bintang Merah*, tahun ke VII, September-Agustus 1951, h. 7. Dokumentasi milik ‘Dokumentasi Indonesia’, Amstredam. *Bintang Merah*, merupak majalah yang diterbitkan oleh Partai Komunis Indonesia.

Pada rapat Istimewa Kabinet Soekiman, pada tanggal 18 Agustus 1951 peristiwa ini sempat menjadi salah satu pokok utama agenda rapat.¹⁰ Namun, sejauh ini penulis belum menemukan dokumen hasil rapat tersebut. Soekiman-Wibisono nampaknya memiliki cara sendiri agar perbedaaan pandangan politik yang dianggapnya berlawanan dengan pemerintah tidak terus meluas dengan gerakan massa. Meskipun pihak lain menganggap keputusan Soekiman-Wibisono melakukan “Razia Agustus” adalah bentuk dari kesewenang-wenangan dan pelanggaran demokrasi.

Setelah dilantik, pada tanggal 28 Mei 1951, perdana menteri Soekiman menyampaikan program kabinetnya didepan parlemen.¹¹ Kebijakan dalam negeri Soekiman ini tidak jauh berbeda dari kebijakan Natsir, yaitu ¹² (1) Keamanan, (2) Mempercepat pembuatan dan pelaksanaan rencana kemakmuran nasional untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat. Selain itu pemerintah juga akan memperbaharui hukum agraria yang sesuai dengan kepentingan petani dan juga mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam lapangan pembangunan, (3) Organisasi Negara, (4) Kebijakan daam bidang perburuan.

Program yang paling diunggulkan atau yang paling diutamakan adalah permasalahan keamanan. Kabinet Soekiman menilai apabila keamanan di Indonesia terjamin, maka tidak mustahil masyarakat akan menjadi makmur karena masyarakat merasa tenang untuk berkarya, berkerja dan mereka tidak akan takut akan kehilangan sesuatu yang telah diperjuangkan seperti harta benda dan bentuk lain. Program keaman ini tidak berhasil dengan baik karena terjadi pergolakan di daerah seerti, Karto Suwiryo di Sulawesi Selatan.

Pada masa pemerintahan kabinet Soekiman mulai diberlakukannya pelarangan pembentukan organisasi yang menyerupai dengan Negara atau menyerupai alat Negara (Angkatan Perang, Polisi, Pamong Praja). Pemerintah mempunyai alasan, apabila oraganisasi-organisasi tersebut berkembang akan menimbulkan kekacauan dimana-mana dan pemerintah menyebut pembentukan organisasi itu sebagai Negara didalam Negara Kesatuan Republik Indonesai serta organisasi itu akan dianggap sebagai pemberontak. Pemerintah juga tidak akan peduli organisasi itu muncul dari dalam atau luar negeri, hal itu dilakukan untuk menghindari adanya konflik. Konflik yang timbul dari kelompok-kelompok organisasi yang mengatasnamakan organisasi Negara akan sangat mudah terjadi dikarenakan saling mempertahankan pendapat atau cara berpikir setiap organisasi tersebut.

Langkah yang diambil oleh Soekiman, dalam bidang kemakmuran adalah melaksanakan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing dan yang sekiranya berpengaruh untuk Negara Indonesia serta rakyat, seperti misalnya menasionalisasikan Bank Sirkulasi. Bank yang akan

¹⁰ “Putusan2 rapat istimewa Kabinet Soekiman 18 Agustus 1951”. Dokumen Arsip Nasional Republik Indonesia.

¹¹P.N.H. Simanjuntak, S.H., *Kabinet-KabinetRepublik Indonesia*. Jakarta: Djamban, 2003, hlm. 119

¹²Amir Hamzah Wiryosukarto, *op, cit.*, hlm. 195

dinasionalisasikan yaitu De Javasche Bank sebagai Bank sirkulasi, masih bersifat partikular. Alasan pemerintah ingin menganalisis Bank tersebut karena diberbagai Negara sudah tidak berlaku Bank yang masih bersifat partikular supaya Bank sirkulasi tersebut dapat berkerja untuk kepentingan umum, bukan hanya kepentingan pemilik modal saja. Pemerintah sangat memperhatikan nasib industri kecil dan koperasi serta pemerintah menyediakan jumlah dana yang cukup besar untuk pembangunan daerah. Kebijakan ini sejatinya sudah dimulai sejak pemerintahan kabinet Hatta.

Soekiman juga berupaya untuk menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Konstituante dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah.¹³ Kabinet Soekiman berencana akan mengganti Undang-undang Dasar Sementara dengan Undang-undang Dasar defenitif yang dibentuk oleh Konstituante.

Menyangkut permasalahan otonomi daerah yang belum selesai pada kabinet sebelumnya, Soekiman berupaya menyelesaikan dengan meninjau kembali Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 disesuaikan dan dijadikan Undang-Undang Negara Kesatuan yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. pada pelaksanaannya, pemerintah berencana tetap menggunakan Undang-Undang lama, hal ini dilakukan untuk menunggu adanya Undang-Undang yang baru sehingga kebijakan akan tetap terlaksana. Berhubungan dengan perlunya pegawai pada daerah-daerah otonom maka pemerintah akan menyiapkan kader-kader pegawai sebanyak mungkin serta mengadakan kursus-kursus yang bersangkutan dengan hal tersebut.¹⁴

Bidang perburuhan, dilakukan perubahan tentang undang-undang larangan mogok yaitu Peraturan kekuasaan Militer Pusat Tahun 1951 yang berisi mengenai larangan mogok dan Lock Out¹⁵ karena dirasa sangat merugikan para buruh. Keadaan buruh yang kurang sejahtera mendorong pemerintah untuk segera mengganti peraturan tersebut paling tidak memberi kesempatan para buruh untuk menyalurkan inspirasinya atau suaranya kepada pemerintah. Menteri perburuhan setuju dengan rencana pemerintah untuk melakukan pencabutan larangan mogok para buruh.¹⁶ Naun demikian pada masa PM Soekiman, Undang-undang Pengakuan Serikat Buruh belum terlaksana dibentuk.

Soekiman juga berusaha menyelesaikan masalah Irian Barat. Kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah Irian Barat agar

¹³ P.N.H. Simanjuntak, S.H. *Kabinet- Kabinet Republik Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi*, Jakarta: Djamban, 2003, hlm. 120

¹⁴ Amir Hamzah Wiryosukarto, *op, cit.*, hlm. 211

¹⁵ Amir Hamzah Wiryosukarto, *op, cit.*, hlm. 213

¹⁶ Suara Nasional, 22 Mei 1951. Pernyataan menteri perburuhan ini diungkapkan pada saat pertemuan dengan wakil-wakil serikat buruh di Bandung. Pemerintah menyatakan sudah punya planning yang jelas kearah terwujudnya ekonomi nasional.

kembali ke Indonesia adalah dengan mengangkat seorang Menteri Urusan Umum yang diharapkan dapat disertai pekerjaan-pekerjaan khusus yang tidak termasuk pekerjaan dalam lingkungan kementerian lain.

a. Politik dalam Negeri Djuanda

Sama halnya dengan Kabinet Soekiman, Kabinet Djuanda dibentuk dalam kondisi politik Indonesia yang tidak stabil. Kabinet ini dibentuk 9 April 1957 setelah Kabinet Ali II demisioner. Kabinet ini adalah ekstra parlementer yang dalam pembentukannya titik berat tidak diletakkan pada aliran-aliran yang ada dalam parlemen, namun didasari atas kemampuan individu. Meskipun demikian kabinet tetap bertanggung jawab kepada parlemen sebagai pemegang kedaulatan rakyat.¹⁷

Program kabinet Natsir dikenal dengan “Panca Karya” meliputi (1) Membentuk Dewan Nasional, (2) Normalisasi keadaan Republik, (3) Melanjutkan pelaksanaan pembatalan KMB, (4) Perjuangan Irian Barat, dan (5) Mempergiat pembangunan. Program-program yang telah direncangkannya coba direalisasikan dalam dua tahun kepemimpinannya (1957-1959).

Pada bidang politik, Kabinet Djuanda memiliki kebijakan untuk membentuk Dewan Nasional. Lembaga ini memberikan masukan kepada pemerintah, baik diminta atau atas inisiatif sendiri, mengenai soal-soal pokok kenegaraan dan pemerintahan diberbagai bidang. Dewan Nasional tidak mengikat dan selalu berdasarkan musyawarah dengan ketentuan kabinet tetap bertanggung jawab kepada DPR. Dewan Nasional beranggotakan orang-orang dari golongan tani, buruh, intelegensia, pengusaha nasional, alim ulama, katholik, protestan, wanita, pemuda, angkatan '45 dan sebagainya. Orang-orang yang dapat mengemukakan persoalan-persoalan daerah disertai beberapa Menteri dan pejabat yang dipandang perlu. Dewan ini dipimpin oleh Presiden dan lebih berhubungan dengan Wakil Ketua.¹⁸

Pada pelaksanaannya Dewan Nasional tidak berfungsi sebagai penyeimbang Parlemen, tetapi justru melemahkan kedudukan Parlemen. Kondisi inilah yang menjadi penyebab dibubarkan Dewan Nasional, melalui dekrit Presiden 1959.

Usaha dalam melakukan normalisasi keadaan politik karena gerakan-gerakan di daerah-daerah (DI/TII Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan) yang menentang Pemerintah Pusat dilakukan Kabinet Juanda dengan mengadakan Musyawarah Nasional.

MUNAS yang diikuti oleh anggota kabinet, pejabat tinggi, utusan sipil dan militer daerah diadakan pada tanggal 10-14 September 1957 di Gedung Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Salah satu hasil dari MUNAS yang terpenting adalah menghendaki pembubaran dewan-dewan di daerah yang bergolak.¹⁹ Beberapa keputusan MUNAS tidak memberikan dampak yang berarti pada pergolakan daerah-daerah, hal ini

¹⁷ *Ibid*, hlm. 41-42.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 44.

¹⁹ Lih. ANRI, *Pernyataan Gerwani Kebayoran Baru Tanggal 27 September 1957*.

dikarena banyak faktor seperti, banyaknya tuntutan daerah yang tidak dapat dipenuhi.

Djuanda juga berupaya untuk menyeimbangkan ekonomi antara daerah dan pusat, melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960. Kebijakan lima tahun disiapkan sejak tahun 1952 oleh Biro Peratjang Nasional (BPN). Namun pada pelaksanaan BPN juga harus menyesuaikan hasil MUNAP yang menitik beratkan pembangunan ekonomi dalam sektor produksi bahan makanan, produksi bahan pakaian, dan pembangunan transportasi. Namun, implemetasi anggaran Kebijakan ima tahun harus mengalami perubahan akibat defisit yang terjadi 1957, alhasil pembangunan ekonomi Lima Tahun tidak maksimal.

Kebijakan dalam bidang ekonomi yang paling fenomenal adalah pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda. Nasionalisasi perusahaan Belanda dilakukan dengan pengambilalihan perebunan-perkebunan, tiga bank dagang, dan perusahaan-perusahaan kecil lainnya yang kemudian dimasukkan ke dalam perusahaan Negara.

Persoalan otonomi daerah yang coba diupayakan oleh Djuanda pun belum menunjukkan keberhasilan. Hambatannya adalah faktor politik yang tidak stabil, dan faktor keuangan negara.

b. Perbandingan Politik dalam Negeri Kabinet Soekiman dengan Kabinet Natsir serta benang merah dalam Konteks Kepemimpinan Indonesia saat ini.

Apabila dilihat dari segi konteks ruang dan waktu kedua kabinet ini nyata-nyata dalam kondisi yang berlainan. Namun, perbandingan kedua kabinet Soekiman dengan Djuanda dalam penelitian ini adalah salah satu upaya untuk mencari benang merah dengan perpolitikan saat ini.

Kabinet Soekiman dibentuk dengan waktu yang lama, dan dipilih dengan menitik beratkan kepartaian. Hasilnya dalam Kabinet Soekiman banyaknya partaiwan (*partijman*) bukan negarawan (*staatsman*) yang duduk dalam kabinetnya berakibat pada munculnya kericuhan politik. Kepentingan masing-masing partai inilah yang kemudian menjatuhkan kabinet, tawar menawar dan politik dagang sapi untuk kepentingan masing-masing partai terus mewarnai kabinet. Menteri harus patuh kepada partainya. Hatta yang menjabat sebagai Wakil Presiden saat itu berbagi pengalamannya “Waktu kabinet Soekiman (1952-1953), satu kali Soekiman mengundang saya yang di saat itu sedang beristirahat di Megamendung, untuk ikut menghadiri sidang kabinet di Istana Cipanas....Setelah berbagai masalah diputuskan bersama, Menteri Penerangan Mononutu yang telah pula menyetujuinya mengatakan agar pelaksanaannya ditangguhkan sampai selesai Dewan Partai PNI. Juga ada Menteri lain yang mengatakan demikian. Saya langsung mengatakan “apakah Saudara-saudara Menteri Negara atau Menteri Partai”.²⁰ Pada saat ini pn yang terjadi adalah *partaiwan* bukan negarawan, maka tak jarang beberapa proyek pemerintah harus disetorkan ke partai. Sebagai contoh adalah kasus-kasus korupsi oleh anggota dewan wkil partai yang diduga hasil korupsi mengalir di pendanaan partai.

²⁰ Bung Hatta Menjawab, 1978. Wawancara Dr. Mohammad Hatta dengan Dr. Z. Yasni. Jakarta: Gunung Agung, h. 70.

Kabinet Djuanda dibentuk dan dipilih dititik beratkan atas kemampuan bukan kepartaian, akibatnya beberapa artai menganggap bahwa kabinet ini tidak resmi karena tidak sesuai dengan aturan kontitusi. Pada akhirnya partai-partai tidak memberikan dukungan atas kebijakan kabinet Djuanda. Kondisi sekarang bisa kita lihat dalam pencalonan pemilihan umum, wakil idependent atau non partai secara umum tidak memiliki suara yang banyak dan cenderung tersisihkan meskipun memiliki kemampuan. Hal ini menandakan, bahwa partai juga diperlukan tetapi sikap negarawan setiap wakil partai juga diperlukan.

Persoalan lain yang dapat ditarik benang merah dari kedua kabinet ini adalah persoalan otonomi daerah. Bila dirunut dari sejarah otonomi daerah dari masa Soekiman hingga saat ini masih meninggalkan banyak persoalan. Persoalan yang sama dan tidak pernah diantisipasi adalah kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai di masing-masing daerah. Persoalan lain adalah perekonomian daerah yang belum siap hingga saat ini muncul istilah “otonomi daerah” adalah usaha “memeratakan korupsi sampai ke daerah-daerah”.

Normalisasi politik dan pergolakan daerah, juga bisa kita ambil benang merahnya. Keseimbangan anatara daerah dan pusat ternyata mutlak diperlukan agar tidak terjadi pergolakan di daerah-daerah. Papua yang diperjuangkan agar menjadi bagian Indonesia (Kabinet Soekiman hingga Djuanda) masih meninggalkan persoalan hingga kini. Muncul pergolakan daerah yang menamakan Organisasi Papua Merdeka yang anggotanya merasa bukan menjadi bagian Indonesia, tetapi “negara” tersendiri. Persoalan seperti ini hendaknya tidak dibiarkan berlarut-larut karena dapat menjadi bumerang bagi kelangsungan kesatuan negara Republik Indonesia. Suara di daerah-daerah hendaknya juga didengarkan, seperti yang diupayakan oleh Djuanda lewat MUNAP.

Normalisasi keamanan seperti yang diambil oleh kabinet Soekiman dengan mengeluarkan larangan dibentuknya pelarangan pembentukan organisasi yang menyerupai dengan Negara atau menyerupai alat Negara (Angkatan Perang, Polisi, Pamong Praja) sangat penting saat ini. Hal ini bisa kita lihan dengan perilaku vandal yang mengatas namanan organisasi massa, seperti FPI (Front Pembela Islam), FAKI (Forum Aliansi Anti Komunis) dan lain-lain.

G. Simpulan dan Saran

Simpulan

Beberapa persoalan Kabinet Soekiman maupn Djuanda sejatinya juga terjadi pada saa ini meskipun dalam konteks yang berbeda, misalnya persoalan otonomi daerah, kepartaian, dan normalisasi keamanan sejatinya masih terjadi pada saat ini. Untuk mengurus negara hendaknya

Saran

1. Perlu tetap diteruskan untuk selalu menekankan penanaman nilai-nilai seperti nasionalisme dan rasa percaya diri di kalangan mahasiswa dalam setiap proses pembelajaran.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menemukan model-model pembelajaran yang lebih tepat lagi untuk meningkatkan penanaman nilai nasionalisme dan rasa percaya diri di kalangan mahasiswa.

H. Daftar Pustaka

DAFTAR PUSTAKA

- Delier Noer, *Partai Islam di Pantas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, Mizan, 1999.
- George Mc. T. Kahin, ed., *Major Goverment of Asia*, Ithaca: Cornell University Press, edition 1976, hlm. 64, dalam Yahya Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1982.
- Gilbert J. Garraghan, Gilbert J. Garraghan, S.J. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press. 1957.
- I.O. Nanulaita, *Ir. H. Djuanda Kartawijaya*, Jakarta: Departemen Pendidikan Kebudayaan Direktorat Jendral Nasional, 1983.
- Louis Gottschalk,. *Mengerti Sejarah*. Nugroho Notosusanto (terj.). Jakarta: UI Press. 2008.
- Mc. Riklef, *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press, 1998.
- Sekretaris Negara, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*, Jakarta Cicero Indonesia, 1981.
- Suswanta, *Keberanian untuk Takut; Tiga Tokoh Masyumi dalam Drama PRRI*. Yogyakarta: Avyrouz, 2000.
- Suratkabar
“Kedjatuhan Kabinet”, *Suara Partai Masjumi*, No. 3-4, Maret/April 1951